

PERAN POLITIK KYAI DALAM PENGENDALIAN KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)

Syaikhu Rozi, Saifudin, M. Ali Rohmad, M. Syarif

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto

syaikhurozi418@gmail.com, Saifzuhry82@yahoo.com, alirohmad86@gmail.com,
gilangcempaka78@gmail.com

Abstract: *As a reality, conflict can occur anywhere, whenever and experienced by anyone due to certain factors, one of which is the process and the results of the Election of Village Heads (PILKADES). Election of Village Head which is carried out directly to elect village leaders, in practice it is often to use money politics and "black campaigns". The PILKADES conflict is rooted in the interests of Botoh (gambling bettors), entrepreneurs and some of their supporters who are trying to win one of the KADES candidates. Efforts are being taken, among others, by developing issues based on personality character and social values to attack the opposing parties resulting in a war of issues and psychological conflicts that manifest in the form of mobilization of time. However, the mobilizations of the people do not develop into physical violence because the conflict can be effectively controlled by the kyai. Implementation of the role of Kyai in controlling PILKADES conflicts are carried out these ways: 1) engaging in informal political discussion; 2) individual communication with political officials; 3) carry out education to the community to strengthen social ties between them, and 4) plunge directly into the field to control and disband the people.*

Keywords: *Kyai, Conflict, PILKADES.*

PENDAHULUAN

Secara historis, bangsa Indonesia sudah lama menganut sistem politik demokrasi, namun demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), sehingga undang-undang dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan demokrasi. Selain itu, tujuan ideologis dan teleologis dari praktik demokrasi di Indonesia adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.¹ Sistem demokrasi konstitusional dianggap paling cocok dengan latar belakang dan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam konteks politik semata, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

¹Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR priode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta : Sekretariat jenderal MPR RI, 2013), 4.



Sukarno menyatakan, demokrasi yang dicita-citakan haruslah demokrasi yang disebut dengan sosio-demokrasi, yaitu demokrasi-politik dan demokrasi ekonomi, yang merupakan demokrasi sejati dan bertujuan untuk mencari kesuksesan politik dan ekonomi, serta kesuksesan bangsa dan kesejahteraan sosial.² Sosio-demokrasi yang dicita-citakan oleh Sukarno merupakan sebuah bentuk demokrasi yang berbeda dengan bentuk demokrasi yang dianut oleh negara-negara, seperti Inggris, Belanda, Perancis, Amerika dan lain-lain, yang menjadikan kapitalisme merajalela sehingga keadaan bangsa menjadi pincang, banyak masyarakat yang tertindas, celaka, bodoh, melarat dan sengsara.³

Secara substansial, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, karenanya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴ Adapun cara dan teknis pelaksanaannya dalam proses pemilihan Kepala Negara sampai Kepala Desa di Indonesia, semuanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang secara formil diatur dalam UUD 1945. Dalam konteks pemilihan Kepala Desa (PILKADES), demokrasi merupakan bentuk pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi tingkat desa. Untuk itu, Kepala Desa dipilih masyarakat desa yang memenuhi persyaratan.⁵ Selanjutnya, hasil PILKADES yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akan mendapat pengakuan dari pemerintah dan segenap warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 2005.

Semua masyarakat desa menghendaki proses PILKADES berjalan damai, aman dan tentram, sehingga menghasilkan Pemimpin Desa yang berintegritas. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan demokratisasi seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, konflik PILKADES kadang terjadi diantara masyarakat pendukung calon Kepala Desa dengan melupakan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai lain yang sebelumnya dipegang masyarakat desa. Selanjutnya, konflik PILKADES menyebabkan masyarakat saling menghujat, saling memfitnah, saling curiga dan hilangnya sikap saling menghormati. Sikap negatif masyarakat desa sebagai akibat PILKADES, merupakan manifestasi konflik yang dapat berkembang menjadi konfrontasi fisik yang lebih merugikan masyarakat desa secara umum.

Jika konflik dapat dikendalikan, maka perilaku masyarakat desa perlahan-lahan akan dapat kembali kepada hubungan sosial yang harmonis, damai, saling menghormati dan hidup rukun dalam budaya yang saling membantu. Adapun dalam upaya pengembangan atau pengendalian konflik di masyarakat, Tokoh Agama seperti kyai merupakan aktor intelektual yang dapat menggerakkan masa melalui ide-ide keagamaan,

²Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964), 174.

³Ibid, 175.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 205.

⁵UU Nomor 8 Tahun 2005 perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 53 Ketentuan tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah/Kota.



sehingga masyarakat desa dapat memiliki motivasi kuat untuk mengendalikan diri atau terlibat dalam situasi konflik secara terus menerus.

PEMILIHAN KEPALA DESA

Masyarakat, dalam terminologi ilmu politik dapat didefinisikan dengan berbagai pengertian. Menurut Robert Maciver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Sementara menurut Harold J. Laski, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai/terpenuhinya keinginan-keinginan mereka bersama.⁶ Keinginan masyarakat diantaranya adalah terrealisasinya nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan seperti:

1. Kekuasaan (*power*)
2. Pendidikan (*enlightenment*)
3. Kekayaan (*wealth*)
4. Kesehatan (*helath*)
5. Ketrampilan (*skill*)
6. Kasih sayang (*affection*)
7. Kejujuran (*rectitude*) dan keadilan (*rechtscapenhied*)
8. Keseganan, respek (*respect*).⁷

Untuk mencapai hal tersebut, setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun akan selalu membutuhkan pemimpin yang menguasai mereka karena kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemilik kekuasaan itu sendiri,⁸ yang terkadang menjadi bagian dari tujuan kelompok. Kekuasaan pemimpin di masyarakat, tidak akan selamanya dimiliki seseorang pemimpin karena kepemimpinan dibatasi oleh suatu priode kekuasaan atau usia pemimpin itu sendiri dalam hidupnya. Jika priode kekuasaan yang dimiliki pemimpin telah habis atau usia pemimpin telah mencapai batasannya, maka kekuasaan dan kepemimpinan harus dicarikan pengganti.

Proses pergantian pemimpin atau yang disebut suksesi kepemimpinan, dapat dilakukan dengan berbagai pola, diantaranya:

1. Pola Dinastik, yaitu dengan sistem penunjukan atau pewarisan. Dalam pola ini, seorang pemimpin mendapatkan jabatan pemimpin sebagai warisan dari pemimpin sebelumnya.⁹
2. Pola Pemilu, yaitu dengan cara memilih seorang pemimpin berdasarkan hasil pemilihan atau mendapatkan suara terbanyak dari para pemilih yang memberikan dukungan kepada para calon pemimpin, baik dalam bentuk pemilihan langsung maupun tidak langsung.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 33-34.

⁷Harold Laswell, *Politics, Who Gets What, When, How* (New York, World Publishing Co., 1972), .202.

⁸op.cid, Miriam, 35.

⁹Munawir Szali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1999), 21.



3. Pola Kudeta, yaitu suksesi kepemimpinan yang dilakukan dengan cara mengganti pemimpin sebelumnya secara paksa, karena penggantinya adalah pemimpin yang memiliki dukungan dan kekuatan.¹⁰
4. Pola People Power, yaitu dengan dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan politik.¹¹

Suksesi kepemimpinan masyarakat desa, dilaksanakan oleh seorang kepala desa yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) terhadap calon kepala desa. Pemenang pemilihan tersebut akan memperoleh masa jabatan selama 6 tahun. Prosedur PILKADES menurut PP No.72 Tahun 2005 pada pasal 43 disebutkan:

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD kemudian memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pada pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dan disahkan menjadi Kepala Desa dengan diberikan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati/Walikota.

KONFLIK PILKADES

Konflik merupakan keadaan interaktif yang termanifestasikan dalam sikap ketidakcocokan, pertentangan, atau perbedaan antar entitas sosial, seperti individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi.¹² Konflik juga diidentikkan dengan pertentangan, yaitu sebuah bentuk perselisihan antara individu atau kelompok masyarakat yang disebabkan karena interest terhadap kepentingan tertentu.¹³ Konflik merupakan potensi universal yang dimiliki oleh setiap individu dalam interaksi sosial. Potensi konflik dapat berbentuk intrapersonal, yang muncul dalam diri setiap pribadi disebabkan karena dorongan-dorongan psikologis yang bertentangan. Adapun konflik interpersonal merupakan potensi individu untuk melakukan permusuhan dan merusak

¹⁰Arwan Tuti Artha, *Kudeta Mei '98; Perseteruan Habibie-Prabowo* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 10-11.

¹¹Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 249.

¹²Afzalur Rahim, *Managing Conflict in Organizations* (New York: Praeger, 1886), 113.

¹³David Lockward dalam Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 1999), 102.



komitmen sosial yang disebabkan karena permasalahan-permasalahan tertentu dalam aspek ekonomi, politik, agama dan lainnya.¹⁴

Ciri-ciri masyarakat yang sedang mengalami konflik diantaranya: a) Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. b) Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi. c) Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. d) Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sesuatu yang menjadi akar konflik. e) adanya perdebatan, pertentangan, perkelahian atau kontak fisik antara pihak-pihak yang berada dalam situasi konflik.¹⁵

Akar atau penyebab konflik di masyarakat diantaranya adalah persoalan sumberdaya ekonomi, kewenangan atau kekuasaan politik, kepentingan serta ide-ide budaya, nilai dan keyakinan tertentu,¹⁶ yang bersifat simbolik namun dapat meningkatkan dan menjadi senjata utama dalam konflik, sebagaimana agama juga dapat menjadi faktor konflik di masyarakat.¹⁷ Selain itu, PILKADES juga merupakan salah satu faktor konflik di masyarakat, terlebih jika salah satu pendukung calon kepala desa tidak puas terhadap proses dan hasil PILKADES yang seharusnya berjalan secara demokratis, LUBER dan JURDIL.

Praktik *money politics* yang banyak dilakukan oleh kontestan PILKADES untuk memenangkan persaingan dengan cara yang tidak jujur serta peran para *Botoh* (petaruh judi) yang ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih kontestan tertentu dengan harapan bila calon yang didukungnya menang akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar juga beresiko melahirkan konflik antar pendukung calon kepala desa karena PILKADES dianggap tidak berjalan secara sportif.¹⁸ Dengan demikian, faktor penyebab konflik PILKADES selain faktor ekonomi dan politik, juga faktor fanatisme dalam memberikan dukungan kepada calon tertentu dan kepentingan untuk memenangkan salah satu calon.

Salah satu contoh persoalan ekonomi dan politik yang menjadi akar konflik PILKADES dapat dilihat dalam sejarah sosial masyarakat yang banyak menjual tanah mereka kepada pengusaha Galian C sejak sebelum proses PILKADES. Sejarah lahirnya konflik dimulai dari usaha Pengusaha Galian C untuk melancarkan bisnisnya dalam membeli tanah Galian C. Cara yang dilakukan adalah dengan mendukung dan menseponsori pencalonan salah satu calon yang akan “bertarung” dalam PILKADES agar mereka mendapatkan kemudahan dalam melakukan penggalan C jika calon yang mereka dukung menang. Sebaliknya, sebagian masyarakat dan pengusaha menganggap bahwa salah satu calon kepala desa yang tidak mereka dukung akan menghalang-halangi

¹⁴M. Fauzan Zenrif, *Filsafat Sosial dalam Paradigma Al-Qur'an, Dekonstruksi Teori Konflik Perspektif Barat*, dalam Jurnal Ulul Albab; Jurnal Studi Islam, Sais dan Teknologi, Vol 4 Nomor 2 tahun 2002 (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2002), 61.

¹⁵Ibid., 18.

¹⁶Dalam analisa sosiologisnya, Randall Collins juga memandang bahwa konflik seringkali dibangun dari sisi gagasan (*ide*) dan cita-cita. Lihat, Rahmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern, Biografi Peletak Sosiologi Modern* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media), 296.

¹⁷Dadang Kamad, *Sosiologi Agama* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 147.

¹⁸Abd. Sidiq Notonegoro, *Demokrasi Busuk Pilkades*. Koran Sindo, 19 April 2013.



bisnis mereka jika kelak ia menang. Bahkan lebih jauh, masyarakat beranggapan bahwa telah terjadi kontrak politik antara pengusaha Galian C dengan salah satu Calon Kepala Desa yang isinya adalah, bahwa pengusaha Galian C akan memberikan bantuan pendanaan untuk kampanye PILKADES salah satu calon. Konsekwensinya jika calon yang didukung tersebut menang dan terpilih menjadi kepala desa, maka seluruh areal persawahan warga akan dijadikan areal penambangan Galian C, termasuk tanah yang menjadi asset desa.

Untuk kepentingan bisnis tersebut, pengusaha dan warga pendukung Galian C melakukan segala cara agar calon yang mereka dukung dapat memenangkan PILKADES dan lawannya kalah. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan memberikan bantuan dana kampanye dan mengembangkan isu-isu yang terkait dengan karakter kepribadian dan nilai-nilai yang dianut para calon. Isu-isu yang dimaksud diantaranya, calon kepala desa yang mereka dukung mendapatkan dukungan dari para kyai dan tokoh masyarakat. Sementara calon yang tidak mereka dukung tidak mendapatkannya karena karakter-kepribadian dan perilakunya banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Isu-isu lain diantaranya, bahwa calon kepala desa yang menjadi lawan mereka memiliki masa lalu yang buruk, seperti gemar mabuk-mabukan, pengguna jasa perdukunan, rentenir, pemakan riba, berasal dari keluarga dan didukung koruptor, suka ke tempat pelacuran dan jika terpilih menjadi kepala desa akan membawa beberapa pelacur ke desa.

Saat para pendukung pihak yang diserang mendengar isu-isu tersebut, maka kemarahan mereka tersulut sehingga terjadilah konflik psikis dalam bentuk perasaan bermusuhan. Selanjutnya, mereka menyerang balik dengan menyebarkan isu-isu yang juga terkait karakter kepribadian dan nilai-nilai kemasyarakatan yang lain sehingga terjadi perang isu.

PERAN KYAI DALAM PENGENDALIAN KONFLIK PILKADES

Masyarakat Indonesia memiliki entitas sosial yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan. Entitas sosial yang dimaksud adalah kyai. Peran kyai dalam teori peranan dapat dilihat dari dua prinsip formal yang menjadi asumsi dasar kesatu-paduan sistem peranan, yakni: penguasaan terhadap aksi atau tindakan dan penguasaan terhadap sumber-sumber dan keuntungan-keuntungan.¹⁹ Realisasi peranan tersebut secara teknis mewujudkan dalam bentuk peran kyai sebagai motivator, sebagai pembimbing moral dan sebagai mediator.²⁰ Realisasi peran-peran yang demikian itu dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk partisipasi politik, diantaranya yang paling memungkinkan adalah dalam diskusi politik informal dan komunikasi individual dengan pejabat politik, atau bahkan dalam bentuk menduduki jabatan politik atau administratif.²¹

¹⁹Soerdjono Soekamto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), 109.

²⁰Peran tersebut dapat disesuaikan dengan peran tokoh agama dalam pembangunan sebagaimana yang dikemukakan Dadang Kamad, Op.Cit., 138-141.

²¹Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik; Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2007), 148.



Secara umum, para kyai juga dapat mengimplementasikan perannya dalam sistem politik yang dipetakan Gabriel Almond menjadi dua macam, yaitu otonom (*autonomous participation*) dan mobilisasi (*mobilized participation*),²² yang diimplementasikan secara konvensional maupun non konvensional sebagai berikut:

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemberian suara ○ Diskusi politik ○ Kegiatan kampanye ○ Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan ○ Komunikasi individual dengan pejabat politik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengajuan petisi ○ Berdemonstrasi ○ Konfrontasi ○ Mogok ○ Tindak kekerasan politik terhadap materi ○ Tindak kekerasan politik terhadap manusia

Implementasi berbagai peran kyai dalam pengendalian konflik PILKADES secara teknis adalah sebagai berikut:

PERAN KYAI	IMPLEMENTASI
Peran Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam diskusi politik informal - Komunikasi individual dengan pejabat politik
Pendidik Umat	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Pendidikan Agama Islam bagi santrinya yang belajar di Madrasah Diniyah. - Memberikan ceramah-ceramah atau mauidzoh hasanah pada kegiatan tahlilan rutin. - Memberikan ceramah-ceramah atau mauidzoh hasanah pada acara manaqiban. - Memberikan ceramah-ceramah pada saat khutbah jum'at di masjid.
Pengendali Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong masyarakat untuk tidak memperlihatkan keberpihakan yang berlebihan kepada salah satu calon. - Mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan <i>money politik</i>. - Mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam fanatisme terhadap salah calon atau terlalu membencinya. - Mengkondisikan pemuda-pemuda dikampungnya untuk tidak terjebak pada situasi konflik.

²²Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, jr., K. Strom, and R. J. Dalton, *Comparative Politics Today; A World View*, seventh edition (New York: Longman, Inc, 1999), p.



Beberapa peran tersebut tidak semuanya dapat diimplementasikan oleh kyai. Sebagai seorang yang menjadi contoh nyata bagi pembinaan mental-spiritual dan *tafaqquh fi ad-din*, seorang kyai dianggap kurang tepat untuk menduduki jabatan politik atau administratif desa karena kyai merupakan pemimpin suci masyarakat desa. Sebagaimana “pemimpin suci” lainnya, kepemimpinan kyai tidak diciptakan melalui proses pemilihan umum atau penunjukan.²³ Sebaliknya, para kyai diangkat sebagai pemimpin masyarakat berdasarkan kharisma yang dimilikinya karena adanya kelebihan-kelebihan seperti intelektual, sikap moral dan kepribadian yang *wira'i*, *karomah* dan kelebihan spiritual dalam menyalurkan *barokah*. Kyai juga tidak tepat jika terlibat dalam aksi konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap material maupun terhadap manusia karena karena tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan, padahal kyai merupakan contoh nyata dalam realisasi norma-norma kemasyarakatan untuk membina mental-spiritual dan *tafaqquh fi ad-din* masyarakat desa.

Peran politik yang paling sesuai untuk dijalankan oleh kyai adalah memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam diskusi politik informal serta komunikasi individual dengan pejabat politik. Diskusi politik informal dalam rangka pengendalian konflik PILKADES dilakukan oleh kyai dengan Calon Kepala Desa secara tidak langsung ketika salah satu calon Kades meminta restu pencalonan dirinya dalam PILKADES. Diantara isi diskusi tersebut kyai meminta Calon KADES dapat mengendalikan dirinya dan pendukungnya untuk tetap menjaga kerukunan warga di masyarakat selama proses pemilihan berlangsung dan sesudahnya, terlepas apakah ia nanti terpilih menjadi kepala desa atau tidak.

Walaupun diskusi tersebut bersifat informal, namun hal itu sangat efektif. Terbukti Calon Kepala Desa dapat menahan diri untuk tidak memicu atau mengembangkan konflik. Actor yang memicu konflik justru pengusaha Galian C dan warga pendukungnya. Adapun komunikasi individual dengan pejabat politik dilakukan oleh kyai dengan mendatangi kepala desa dan mendiskusikan cara-cara yang perlu dilakukan untuk dapat menjaga aset-aset desa, seperti areal persawahan yang biasa digunakan sebagai “*ganjaran*” lurah dan perangkatnya. Selain melalui politik desa, peran kyai sebagai pengendali konflik juga diimplementasikan kyai dengan cara melakukan pengembangan manajemen konflik sebagai berikut :

1. Mengkondisikan diri sendiri dan keluarganya, serta semua orang yang berada dalam intitusinya untuk tidak memperlihatkan keberpihakannya secara langsung dan berlebihan kepada salah satu calon kepala desa, bahkan walapun calon tersebut berasal dari kampungnya sendiri.
2. Mengkondisikan diri sendiri dan keluarganya, serta mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan *money politik*. Untuk itu, kyai beserta keluarganya selalu menolak pemberian dari para tim sukses kedua calon, baik dalam bentuk uang atau bantuan sarana dan prasana yang diberikan atas nama pribadi, maupun dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan institusinya.

²³Tamim Ansari, *Dari Puncak Bagdad; Sejarah Dunia Versi Islam* (Jakarta: Zaman, 2010), 77.



3. Mengkondisikan diri sendiri dan keluarganya, serta mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam sikap fanatisme kepada salah satu calon sehingga memunculkan perilaku terlalu “mencintai” salah calon atau terlalu membencinya.
4. Mengkondisikan pemuda-pemuda dikampungnya untuk tidak terjebak pada situasi konflik.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan hal di atas, diantaranya dengan mengimplementasikan peran sebagai pendidik umat yang melaksanakan proses pendidikan dengan cara memberikan pengajaran, baik kepada masyarakat secara luas atau melalui proses pembelajaran pada lembaga yang dikelola. Metode yang digunakan adalah:

1. Memberikan Pendidikan Agama Islam bagi santrinya yang belajar di Madrasah Diniyah.
2. Memberikan ceramah-ceramah atau *mauidzoh hasanah* pada kegiatan tahlilan rutin.
3. Memberikan ceramah-ceramah atau *mauidzoh hasanah* pada acara manaqiban.
4. Memberikan ceramah-ceramah pada saat khutbah jum'at di masjid.

Secara umum, kegiatan-kegiatan di atas sesungguhnya merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Kyai. Namun dalam konteks pengendalian konflik, kegiatan-kegiatan tersebut ditekankan pada bagaimana masyarakat dapat mempererat ikatan sosial mereka walaupun berada dalam realitas yang majemuk, seperti mengajarkan bagaimana masyarakat dapat mempererat ikatan sosial diantara mereka. Pengajaran dilaksanakan sesuai konteksnya karena diajarkan dalam kondisi masyarakat yang tengah berada dalam situasi yang berpotensi mengalami konflik antar pendukung calon kepala desa dalam PILKADES.

Pengendalian konflik PILKADES juga dilakukan kyai secara langsung untuk mengendalikan kerumunan masa dan membubarkannya. Strategi yang dilaksanakan hanya dengan cara mendatangi kerumunan masa tersebut dan bertanya kepada mereka tentang keributan yang terjadi. Namun cara tersebut ternyata efektif, karena hanya dengan mendatangi, warga yang berkerumun satu persatu meninggalkan kerumunan dan membubarkan diri. Proses pengembangan manajemen konflik PILKADES yang dilakukan kyai berjalan cukup efektif karena kekuatan kharisma kyai dan hubungan sosial santri dengan kyai.

Para santri, baik santri mukim maupun santri kalong memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antara santri dengan santri maupun antara santri dengan kyai. Situasi sosial yang berkembang di antara mereka menumbuhkan sistem sosial tersendiri. Mereka belajar, memimpin dan dipimpin serta mentaati dan meneladani kehidupan kyai, di samping juga bersedia menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh kyai bahkan setelah mereka telah keluar dari pesantren dan menjadi anggota masyarakat.

Dalam kenyataan sosial di masyarakat, sebagian warga masyarakat adalah para santri-santri yang merupakan murid kyai. Mereka memiliki sikap paternalitas yang kuat kepada kyainya. Sikap paternalitas tersebut serta didukung oleh kharisma kyai dalam kehidupan sosial menyebabkan kyai memiliki kekuatan besar untuk dapat memobilisasi masyarakat pedesaan dan menghindarkan mereka terlibat dalam situasi konflik manifest yang berbentuk kekerasan fisik.



PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung untuk memilih salah satu calon pemimpin desa. Dalam praktiknya terdapat praktik *money politick* dan “kampanye hitam” namun PILKADES masih dapat dilaksanakan dengan lancar, dalam arti pemilihan telah dapat dilaksanakan sampai menghasilkan kepala desa terpilih, walaupun diwarnai beberapa konflik laten yang tidak sampai memmanifestasikan dalam bentuk kekerasan fisik.

Konflik pemilihan Kepala Desa berakar dari adanya kepentingan para *Botoh*, Pengusaha dan sebagian masyarakat pendukungnya yang berupaya memenangkan salah satu calon KADES. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengembangkan isu berbasis karakter kepribadian dan nilai-nilai kemasyarakatan untuk menyerang pihak lawan sehingga terjadi perang isu dan konflik psikis yang termanifestasi dalam bentuk pengerahan masa. Namun aksi kekerasan fisik tidak terjadi karena konflik dapat dikendalikan secara efektif oleh salah satu kyai.

Implementasi peran politik kyai dalam pengendalian konflik PILKADES dilaksanakan dengan cara 1) terlibat dalam diskusi politik informal; 2) komunikasi individual dengan pejabat politik; 3) melaksanakan pendidikan kepada masyarakat untuk mempererat ikatan sosial di antara mereka, serta 4) terjun secara langsung kelapangan untuk mengendalikan dan membubarkan masa.

Mengingat kyai mempunyai peran besar dalam pengendalian konflik di masyarakat, maka peran kyai sebagai agen pengendali konflik perlu dioptimalkan dengan cara memperkuat peran dan posisi mereka sebagai pendidik umat yang mengajarkan kearifan agama dan nilai-nilai anti kekerasan dalam kehidupan. Strategi yang dilaksanakan baik melalui pengajaran maupun melalui contoh langsung (keteladan), atau sebagai mediator yang memediasi antar kelompok yang bertikai secara langsung atau dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum serta memberi dukungan dan dorongan bagi lembaga tersebut untuk menyediakan perangkat penyelesaian konflik di masyarakat. □

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G, Gabriel A, Bingham Powel, jr., K. Strom, and R. J. Dalton, 1999. *Comparative Politics Today; A World View*, seventh edition (New York: Longman, Inc
- Ansari, Tamim, 2010. *Dari Puncak Bagdad; Sejarah Dunia Versi Islam*. Jakarta: Zaman.
- Artha, Arwan Tuti, 2007. *Kudeta Mei `98; Perseteruan Habibie-Prabowo*. Yogyakarta: Galang Press.
- Calvert, Peter, 1993. *Proses Sukses Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kamad, Dadang, 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



- Laswell, Harold, 1972. *Politics, Who Gets What, When, How*. New York, World Publishing Co.
- Maran, Rafael Raga, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Reineka Cipta.
- Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notonegoro, Abd. Sidiq, *Demokrasi Busuk Pilkades*. *Koran Sindo*, 19 April 2013.
- Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR priode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat jenderal MPR RI
- Rahim, Afzalur, 1996. *Managing Conflict in Organizations*. New York: Praeger.
- Sazali , Munawir, 1999. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Soekamto, Soerdjono, 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukarno, 1964. *Di Bahwah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi.
- Susilo, Rahmad K. Dwi, 2009. *20 Tokoh Sosiologi Modern, Biografi Peletak Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media
- Tamburaka, Rustam E., 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Jakarta: PT. Reineka Cipta.
- UU Nomor 8 Tahun 2005 perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 53 Ketentuan tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah/Kota.
- Zenrif, M. Fauzan, 2002. *Filsafat Sosial dalam Paradigma Al-Qur'an, Dekonstruksi Teori Konflik Perspektif Barat*, dalam *Jurnal Ulul Albab; Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi*, Vol 4 Nomor 2 tahun 2002. Malang : Universitas Islam Negeri Malang.

